

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DIT. FT 1354/per-ump/2011
Tanggal 24-10-2011

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA
PERUSAHAAN DAERAH PASAR
PALEMBANG JAYA**

SKRIPSI



OLEH:

NAMA : VALLEN FEBRIYANTI

NIM : 22 2007 035

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2011**



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA
PERUSAHAAN DAERAH PASAR
PALEMBANG JAYA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH:

**NAMA : VALLEN FEBRIYANTI
NIM : 22 2007 035**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2011**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VALLEN FEBRIYANTI

NIM : 22 2007 035

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, September 2011



VALLEN FEBRIYANTI

**Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK
TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN
RETRIBUSI PASAR PADA PERUSAHAAN
DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA**

**Nama : Vallen Febriyanti
Nim : 22 2007 035
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik**

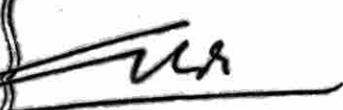
**Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal, 4/8-2011**

Pembimbing


(M. Taufiq Syamsuddin, SE, Ak., M.Si)

**Mengetahui Dekan
Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi**




(Drs. Sunardi, SE, M.Si)

MOTTO :

- **Kepahitan hidup yang dirasakan, jadikan suatu pengalaman sebab itu merupakan langkah awal untuk meraih kesuksesan.**
- **Tak ada sesuatu yang lebih menyenangkan dari pada menimbulkan senyum pada wajah orang lain, terutama wajah orang yang kita cintai.**

Kupersembahkan Kepada :

- **Papi dan Mami yg Tercinta**
- **Saudara-saudara ku yg sayangi
(Mbak'Idha, Mbak'eka, dan Dedek)**
- **Seseorang yang akan menjadi
imam'q kelak**
- **Sahabat-sahabatku tersayang**
- **Pembimbing skripsi**
- **Almamaterku yg q banggakan**

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

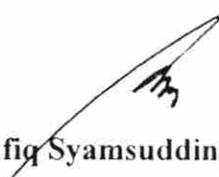
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK
TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN
RETRIBUSI PASAR PADA PERUSAHAAN
DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA

Nama : Vallen Febriyanti
Nim : 22 2007 035
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

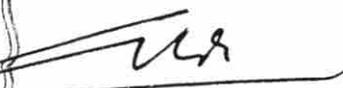
Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal, 4/8-2011

Pembimbing


(M. Taufiq Syamsuddin, SE, Ak., M.Si)

Mengetahui Dekan
Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi




(Drs. Sunardi, SE, M.Si)

MOTTO :

- Kepahitan hidup yang dirasakan, jadikan suatu pengalaman sebab itu merupakan langkah awal untuk meraih kesuksesan.
- Tak ada sesuatu yang lebih menyenangkan dari pada menimbulkan senyum pada wajah orang lain, terutama wajah orang yang kita cintai.

Kupersembahkan Kepada :

- Papi dan Mami yg Tercinta
- Saudara-saudara ku yg sayangi
(Mbak'Idha, Mbak'eka, dan Dedek)
- Seseorang yang akan menjadi imam'q kelak
- Sahabat-sahabatku tersayang
- Pembimbing skripsi
- Almamaterku yg q banggakan



PRAKATA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT serta sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena atas rahmat dan bimbingan jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna guna mengingat keterbatasan pengalaman, pengetahuan serta kemampuan penulis. Walaupun demikian penulis telah berusaha untuk membuat skripsi ini sesuai dengan kemampuan dan pengalaman penulis serta bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Idris, SE, M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak M. Taufiq Syamsuddin, SE, Ak, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang dan Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, saran, dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini kepada penulis.

3. Bapak Drs. Sunardi,SE. M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Welly, SE. M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Betry Sirajuddin,SE.AK.M.Si selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen beserta Staff karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar diperguruan tinggi.
7. Bapak Kepala Kantor Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya serta seluruh Staf dan Karyawan yang telah memberikan izin serta bantuan kepada penulis dalam penganbilan data sebagai bahan penyusunan skripsi ini.
8. Papi,Mami,& saudara2'q tercinta, yang telah mendidik, membiayai, memberikan orongan dan semangat, serta do'a yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis.
9. Kk'abie terszang yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan, serta motivasi untu penulis.
10. Sahabat-sahaat seperjuangan ku : Dixtry's,Atun,Lili, Ninie,Nina,Iin, Febry, Gita,Suci,Lulk,& Vera, yang telah memberikan semangat dan dorongan serta bantuan baiknoril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.(thx to all, keep spirit ycoh ^_^).
11. Sahabat-sahaat KKN angkatan 35 'Jiwa Baru, sahabat baru q karena kalian aq Merasaan kebersamaan, kekeluargaan, & mengerti artinya kesederhana,(miss u all)

12. Teman-teman angkatan 2007 dan 2008 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, nasehat serta saran sehingga terselesainya skripsi ini (Makasih n tetap semangat yaa...)

Semoga Allah SWT , Membalas segala kebaikan, bimbingan dan bantuan yang telah kalian berikan. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata penulis mengharapkan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis dan mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang. Amin Ya Robbal Alamin.

Palembang. September 2011
Penulis

Vallen Febriyanti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN/COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PRAKATA.....	vix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya.....	9
B. Landasan Teori.....	11
1. Retribusi Pasar.....	11
2. Retribusi Daerah.....	18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	25
B. Tempat Penelitian.....	26
C. Operasionalisasi variable.....	26
D. Data Yang Diperlukan.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN	
1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	31
2. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas, Fungsi dan Wewenang Serta Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.....	32
3. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.....	51

4. Aktifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.....	52
5. Jenis atau Pengelompokan Pasar dan Kondisi Pasar Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.....	53

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.....	65
1) Faktor Internal.....	65
2) Faktor External.....	69
2. Analisis Faktor Yang Paling Dominan Yang Mempengaruhi Tidak Tercapainya Target Retribusi Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.....	70

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel I.1	: Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Tagihan Retribusi Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Tahun Anggaran 2006 s/d 2010.....	4
Tabel III.1	: Operasionalisasi Variabel.....	26
Tabel VI.1	: Nama Pasar dan Alamatnya.....	55
Tabel VI.2	: Kondisi Pasar Tradisional Kota Palembang Tahun 2010.....	56
Tabel VI.3	: Besarnya Tarif Retribusi Pasar yang Ditetapkan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.....	60
Tabel VI.4	: Daftar Hasil Jumlah Jawaban Atas Pertanyaan Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.....	70

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
GAMBAR IV.1 : Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Riset
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Persetujuan Skripsi
- Lampiran 4 : Sertifikat Mengaji
- Lampiran 5 : Biodata Penulis

ABSTRACT

The problem of this study was what factors that caused the Unreachable target of The Analysis of Factors Causing the Market Retribution Receipt at PD. Pasar Palembang Jaya were.

The objective of this study was to find out what factors Causing the Market Retribution Receipt at PD. Pasar Palembang Jaya.

The study was conducted at PD. Pasar Palembang Jaya on JL.K.H.Ahmad Dahlan Lt.2 Palembang, Phone (0711)352249. The data used in this study were primary and secondary data. Techniques of collecting the data were using interview and documentation. Method of analysis in this study was qualitative analysis.

Based on the analysis, it concluded that the sanction implemented at PD. Pasar Palembang Jaya had many weaknesses, as a result, it caused the infringement done by the irresponsible person.

Keywords : Factors Causing the Unreachable Target of Market Retribution Receipt.

ABSTRAK

Vallen Febriyanti/222007035/2011/Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya”.

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.

Tempat penelitian dilakukan pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yang Beralamat di Jalan K.H Ahmad Dahlan Lt. 2 Bukit Kecil Palembang. Telp (0711) 352249. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan sanksi yang diterapkan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya masih terdapat kelemahan, sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci : Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pasar

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan berkembang apabila disertai dengan pendanaan yang cukup memadai. Sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah diperoleh dari pendapatan asli daerah dan bantuan pemerintah pusat melalui subsidi dalam bentuk dana perimbangan tetapi setelah diberlakukan Undang-undang Otonomi Daerah subsidi pemerintah pusat menjadi berkurang peranannya.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 1997, yang mengatur tentang Retribusi pasar, bahwa retribusi pasar adalah pemungutan uang sebagai pembayaran pemakai karena memperoleh jasa pekerjaan atau usaha yang mempunyai hubungan langsung dari kontraprestasi kepada pemakai pasar tersebut. Adapun retribusi pasar yang tersebut meliputi: retribusi sewa petak, retribusi harian, retribusi kebersihan dan keamanan, retribusi MCK/WC, administrasi, uang kunci, dan retribusi parkir.

Pemungutan retribusi pasar sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Daerah tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pasar Kota Palembang, karena sistem pengurusan dan penggolaan retribusi pasar belum berjalan secara efisien, efektif, dan profesional, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya maka Dinas Pasar dirubah menjadi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.



Melalui perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan target dan realisasi penerimaan retribusi pasar sehingga berpengaruh terhadap retribusi daerah yang digunakan sebagai sumber pembangunan daerah dan dengan perubahan tersebut, sistem pengurusan dan penggolaan retribusi pasar dapat berjalan secara efisien, efektif dan profesional. Adapun penggolaan retribusi pasar menurut Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 1997 tentang retribusi pasar terdiri dari:

1. Pendapat objek dan subjek retribusi pasar
2. Penentuan besarnya tarif retribusi pasar
3. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar
4. Penyetoran hasil pemungutan retribusi pasar
5. pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran hasil retribusi pasar

Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan keuangan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan-bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Oleh karena itu pendapatan asli daerah harus menjadi sumber keuangan yang besar dan didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Indra Bastian : 2001).

Retribusi dibagi atas tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu retribusi yang harus dilakukan adalah retribusi pasar. Retribusi pasar termasuk dalam jenis retribusi jasa umum.

Retribusi daerah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah retribusi pasar yang termaksud dalam retribusi jasa umum. Menurut Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2003 tentang retribusi yang dimaksud dengan retribusi pasar adalah pembayaran dan penyediaan fasilitas pasar tradisional perlataran, los, kios yang dikelola daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang.

Pemerintah didalam memunggut retribusi pasar, harus secara koordinatif dilakukan oleh bagian keuangan bersama-sama dengan pembangunan daerah, yang menyatakan prinsip dasar pemungutan yang dinamis dan berimbang, tapi pada kenyataannya masih terjadi pemungutan yang tidak berpedoman kepada pengalaman penerimaan tahun sebelumnya, dan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya belum tepat menentukan besarnya target penerimaan retribusi pasar tersebut.

Pemberlakuan retribusi adalah sebagai sumber keuangan daerah yang tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan diatur dalam peraturan retribusi daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah harus membayar retribusi daerah. Tidak tercapainya target yang ditetapkan instansi pemerintah terhadap retribusi pasar dikarenakan adanya

pungutan liar, pungutan yang tidak disetorkan kepada pihak yang berwenang atau yang bertanggung jawab, hal ini disebabkan minimnya atau kurangnya pengawasan dari pihak dinas, dan kurang efektifnya pemberlakuan Sanksi terhadap pelanggar sehingga membuat rendahnya realisasi dari target yang diinginkan.

Adapun gambaran tentang target dan realisasi penerimaan retribusi pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya beserta selisih dan persentase kenaikan dan penurunan pencapaian target dan realisasi mulai dari tahun anggaran 2006 sampai tahun anggaran 2010 dapat dilihat tabel I.1 berikut ini.

Tabel I.1
Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Tagihan Retribusi Pasar
Perusahaan Pasar Palembang Jaya Tahun Anggaran 2006 s/d 2010
(Dalam Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase (%)
1	2006	2.720.938.468	2.558.154.338	162.784.130	5.98
2	2007	3.192.884.075	2.966.417.997	226.466.078	7.09
3	2008	3.374.768.925	3.042.381.788	332.387.137	9.84
4	2009	5.542.877.955	5.356.488.272	186.389.683	3.36
5	2010	6.190.955.916	5.954.117.438	236.838.478	3.82

Sumber : Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya 2011

Tabel I.1 menunjukkan bahwa target retribusi pasar pada Tahun 2006 adalah Rp. 2.720.938.468 sedangkan realisasinya Rp. 2.558.154.338 dengan selisih Rp. 162.784.130 dan tingkat pencapaiannya sebesar 5.98% dan pada tahun 2007 target retribusi pasar sebesar Rp.3.192.884.075 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp.2.966.417.997 dengan selisih Rp.226.446.078 atau 7.09% sedangkan pada Tahun 2008 target yang ditetapkan sebesar Rp.3.374.768.925 dan realisasinya sebesar

Rp.3.042.381.788 dengan selisih Rp.332.387.137 atau 9.84% dan pada Tahun 2009 target retribusi pasar ditetapkan sebesar Rp.5.542.877.955 dan realisasinya sebesar Rp.5.356.488.272 dengan selisih Rp.186.389.683 atau 3.36% dan pada Tahun 2010 target retribusi yang ditetapkan sebesar Rp.6.190.955.916 dan realisasinya sebesar Rp.5.954.117.438 dengan selisih Rp.236.838.478 atau 3.82%.

Pada tahun 2006 s/d 2009 tarif retribusi yang dipungun oleh Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya adalah :

- a. Tarif parkir Rp.500 1 kali parkir
- b. Tarif Wc Rp.500 1 kali pakai
- c. Listrik Rp.5000/watt perbulan
- d. Tempat berjualan ditanah pasar terbuka yang dipakai secara tidak tetap yang luasnya tidak lebih dari 1,5 m x 1,5 m dipungut retribusi harian sebesar Rp. 2000/hari.
- e. Tempat berjualan ditanah pasar terbuka yang dipakai secara tetap yang luasnya tidak lebih dari 1,5 m x 1,5 m dipungut retribusi harian sebesar Rp. 30.000/bulan.
- f. Retribusi tempat yang menempati kios, los, pelantaran, sebesar Rp. 30.000/bulan.
- g. Retribusi kebersihan dan ketertiban sebesar Rp.1.000/hari.

Dari hasil penagihan retribusi pasar tersebut maka Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya pada tahun 2006 dapat merealisasikan penerimaan sebesar Rp.2.558.154.338 dan pada Tahun 2007 dapat merealisasikan penerimaan sebesar Rp.2.966.417.997 pada tahun 2008 dapat merealisasikan penerimaan sebesar Rp.3.042.381.788 pada Tahun 2009 dapat merealisasikan penerimaan sebesar Rp.5.356.488.272.

Pada Tahun 2010 Perusahaan Daerah Palembang Jaya menaikkan tarif retribusi pasar sebagai berikut:

- a. Tarif parkir Rp.1.000 1 kali parkir
- b. Tarif Wc Rp.1.000 1 kali pakai
- c. Listrik Rp.10.000/watt perbulan
- d. Tempat berjualan ditanah pasar terbuka yang dipakai secara tidak tetap yang luasnya tidak lebih dari 1,5 m x 1,5 m dipungut retribusi harian sebesar 3.000/hari.
- e. Tempat berjualan ditanah pasar terbuka yang dipakai secara tetap yang luasnya tidak lebih dari 1,5 m x 1,5 m dipungut retribusi harian sebesar 50.000/bulan.
- f. Retribusi tempat yang menempati kios, los, pelantaran, sebesar Rp. 50.000/bulan.
- g. Retribusi kebersihan dan ketertiban sebesar Rp.2.000/hari.

Pemerintah Kota Palembang dengan melihat jumlah pertumbuhan pedagang dipasar-pasar yang semakin hari semakin meningkat dan tarif retribusi juga yang telah dinaikkan maka Pemerintah Kota Palembang

menaikkan tarif pada tahun 2010 dan Pemerintah Kota Palembang menetapkan target sebesar Rp.6.190.955.916 tetapi Perusahaan daerah Pasar Palembang Jaya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah hal tersebut dapat dilihat Selama 5 Tahun belakang Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Tidak dapat Mencapai Target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas maka judul penelitian yang akan diangkat penulis adalah “ **Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas yang akan menjadi permasalahan yang dirumuskan oleh penulis adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya?
2. Dari faktor yang ada, faktor mana yang paling dominan yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.
2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pemungutan retribusi pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya melalui pengetahuan penulis yang diperoleh selama dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada dilapangan.

b. Bagi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya

Sebagai masukan bagi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya untuk mengambil kebijakan dalam rangka mencapai target pemungutan retribusi pasar.

c. Bagi Almamater

Sebagai bahan referensi dan kerangka acuan yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul “Evaluasi Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Hubungannya Untuk Meningkatkan Retribusi Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yang telah dilakukan oleh Nurmala Sari (2002). Dimana kesimpulan dari penelitian tersebut adalah:

Perumusan Masalah, Bagaimana pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dalam meningkatkan retribusi daerah yang sebaiknya dan berapa besar kontribusi yang diberikan retribusi pasar terhadap retribusi daerah. Tujuan Penelitian, Untuk mengetahui pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dalam meningkatkan retribusi daerah Kota Palembang dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan retribusi pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. Metode yang digunakan Metode Kuantitatif dan Kualitatif, Teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Variabel yang digunakan adalah Pengelolaan Retribusi Pasar dan Retribusi Daerah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengelolaan retribusi pasar dalam hubungannya untuk meningkatkan retribusi daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya masih ada pengelolaan retribusi pasar yang masih

belum sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku misalnya dalam pendataan objek dan subjek retribusi pasar yang belum akurat, hal ini disebabkan karena seringnya subjek pasar berpindah-pindah lokasi tempat berjualan dalam hal ini adalah pedagang kaki lima. Dilihat dari segi tarif retribusi pasar Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya ternyata tarif yang ditentukan masih terlalu rendah karena masih memakai Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Tahun 1987 Nomor 12 yang tidak sesuai lagi dengan pesatnya perkembangan perekonomian saat ini. Dalam hal penyeteroran hasil pemungutan retribusi pasar sudah dikatakan cukup baik karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang sekarang dilakukan oleh penulis yaitu berada pada ruang lingkup penelitian di Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang Pengelolaan Retribusi Pasar dan Retribusi Daerah dan penulis meneliti tentang Faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi pasar.

B. Landasan Teori

1. Retribusi Pasar

a. Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi pasar dalam pembagiannya masuk ke dalam retribusi jasa umum. Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Retribusi Pasar adalah pungutan langsung dikenakan pada pungutan fasilitas jasa layanan pasar yang dari penggunaan tersebut mendapatkan timbal balik secara langsung pengguna fasilitas tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 1997, Retribusi Pasar adalah pemungutan uang sebagai pembayaran pemakai karena memperoleh jasa pekerjaan atau usaha yang mempunyai hubungan langsung dari kontra prestasi kepada pemakai retribusi pasar tersebut.

Retribusi pasar menurut penjelasan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 adalah pemungutan atas pelayanan pasar yang meliputi fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelantaran, los, yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Berdasarkan pengertian tentang retribusi pasar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi pasar adalah pungutan atas pemakaian fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

b. Pengelolaan Retribusi Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 1997, Pengelolaan retribusi pasar terdiri dari :

1) Pendapatan objek dan subjek retribusi pasar

Menurut penjelasan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, objek retribusi pasar adalah tempat berjualan di pasar sedangkan subjek retribusi pasar adalah setiap pedagang yang memakai tempat berjualan di pasar.

Objek Retribusi Pasar yang di data meliputi :

- a) Jumlah petak, los, kios, pasar yang ditunggu dan yang kosong dan luas tanah yang digunakan untuk pedang kaki lima.
- b) Fasilitas pendukung pasar seperti penerang, air dan sarana pendukung lainnya.

Berdasarkan terap Subjek Retribusi Pasar meliputi jumlah pedagang yang menempatin los, petak, kios, dan pedagang kaki lima pada setiap unit pasar.

2) Penentuan besarnya tarif retribusi pasar

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dalam pasal 8 disebutkan bahwa :

“Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan”.

Berdasarkan pasal 8 tersebut maka tarif Retribusi Pasar yang meliputi sewa tempat berjualan, pelayanan kebersihan, dan pelayanan keamanan harus memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Jasa Umum.

3) Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dalam Pasal 12 menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 26 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, maksudnya adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Pemungutan retribusi pasar atau sewa tempat berjualan dilakukan setiap bulan dan pembayaran paling lambat tanggal 10. Jika tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar dan akan



ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah setelah terlebih dahulu diberikan peringatan.

4) Penyetoran hasil pemungutan retribusi pasar

Penyetoran hasil Retribusi Pasar diatur dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah Menurut peraturan ini uang hasil pemungutan Retribusi pasar harus disetorkan secara langsung pada Bendaharawan.

5) Pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran hasil retribusi pasar

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pengawasan dilakukan untuk menghindari dan mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi agar tidak merugikan

Menurut Pasal 96 Keputusan Menteri Dalam Negeri disebutkan bahwa:

- a. Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 bukan bersifat pemeriksaan
- c. Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan perundangan berlaku

Selanjutnya dalam Pasal 97 disebutkan bahwa :

- a. Untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah
 - b. Pengawasan internal sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen pemerintah daerah
 - c. Pejabat pengawas internal sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 yaitu melaporkan hasil pengawasan internal kepada kepala daerah
 - d. Pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 ditetapkan oleh Kepala daerah
- 6) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Abdul Halim dan Jamal Nasir (2006:49) Dalam kajian tentang keuangan daerah pemerintah kota Malang untuk menganalisis masalah dalam penerimaan sumber-sumber keuangan daerah dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diterima oleh pemerintah daerah adalah belum optimalnya pajak dan retribusi daerah dimana penyebabnya ada tiga faktor, sebagai berikut :

- a. Penemuan target belum² realistis, ini bisa dilihat dari pemantauan target berdasarkan anggaran.
- b. Masih tingginya tingkat kebocoran / kelolosan
- c. Belum efektifnya pemberlakuan sanksi
- d. Berkurangnya jenis objek penerimaan
- e. Pelayanan operasional dilapangan masih belum prima
- f. Terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksana operasional di lapangan
- g. Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan
- h. Belum memiliki data dasar mengenai potensi sumber penerimaan
- i. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan.

Menurut Mudrajat Kuncoro (2000:414) Ada lima penyebab utama rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada gilirannya menyebabkan ketergantungan terhadap subsidi pemerintah pusat, adalah sebagai berikut :

- a. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan
- c. Kendati pajak sangat beragam, tetapi hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan



- d. Penyebab keempat bersifat politis, ada yang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme
- e. Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

Menurut Susilo (2000:44) besarnya Penerimaan Pendapatan Daerah pada dasarnya dipengaruhi besarnya potensi ekonomi daerah, juga dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

- a. Organisasi dan perencanaan
- b. Peraturan daerah, sistem prosedur
- c. Koordinasi dan kemampuan personil
- d. Analisa dan pengawasan
- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki
- f. Sanksi bagi wajib pajak atau retribusi
- g. Data dasar

2. Faktor Eksternal

- a. Kesadaran wajib pajak / wajib retribusi daerah
- b. Pertumbuhan objek penerimaan
- c. Perekonomian daerah
- d. Kebijakan pemerintah
- e. Kondisi objek penerima

2. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut M.Orba Kurniawan dan Hasyim (2004:108) Pengertian Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Suparkomo (2003:85) menyatakan bahwa, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau golongan.

Indra Bastian (2003:85) mendefinisikan Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

b. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Marihot P.Siahaan (2005:7) menyatakan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah :

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-undang peraturan daerah yang berkenaan

Karena retribusi merupakan pungutan berdasarkan Undang-undang Peraturan daerah maka dengan pembentukan perundang-undangan tersebut dapat menetapkan ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dimana hasil dari retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dimana untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk kas pemerintah daerah

Hasil penerimaan retribusi masuk kas pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah yang akan mengelola keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah.

- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

Karena pemerintah telah menyediakan pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum untuk kepentingan orang pribadi atau golongan masyarakat sesuai dengan peraturan

daerah yang berlaku maka pihak yang menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut harus balas jasa kepada pemerintah.

- 4) Retribusi terhutang apabila ada jasa-jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

Apabila fasilitas yang disediakan oleh pemerintah digunakan untuk kepentingan orang pribadi atau golongan, oleh karena itulah fasilitas tersebut merupakan retribusi terhutang.

- 5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomi yaitu tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Bagi pihak yang menggunakan fasilitas pemerintah apabila tidak membayar retribusi maka ia tidak akan mendapat jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah.

c. Golongan-golongan Retribusi Daerah

Menurut Erly Suandy (2005:242), Retribusi dibagi atas tiga golongan, yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum

- a) Kriteria Retribusi Jasa Umum

- (1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.

- (2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- (3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi.
- (5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
- (6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- (7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan
- (2) Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan
- (3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengambunan mayat
- (5) Retribusi parkir ditepi jalan umum

- (6) Retribusi pasar
- (7) Retribusi air bersih
- (8) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- (9) Retribusi pemeriksaan alat pemadaman kebakaran
- (10) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- (11) Retribusi pengujian kapal perikanan

2) Retribusi Jasa Usaha

a) Kriteria Retribusi Jasa Usaha

- 1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang memiliki / dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

b) Jenis Retribusi Jasa Usaha

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan
- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi terminal
- 5) Retribusi tempat khusus parkir

- 6) Retribusi tempat penginapan / persinggahan / villa
 - 7) Retribusi rumah potong hewan
 - 8) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - 10) Retribusi penyeberangan di atas air
 - 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
 - 12) Retribusi penyedotan kakus
 - 13) Retribusi pengolahan limbah air
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu
- a) Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu
 - 1) Perizinan tersebut termaksud kewenangan pemerintah yang serahkan kepada Daerah dalam Rangka asas sentralisasi
 - 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
 - 3) Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi Perizinan
 - b) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu
 - 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
 - 2) Retribusi izin tempat berjualan minuman beralkohol
 - 3) Retribusi izin gangguan
 - 4) Retribusi izin trayek

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18
Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan :

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta

3) Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2001:11) jenis penelitian jika dilihat dari tingkat ekplanasinya ada 3 macam yaitu :

1) Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2) Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Di sini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

3) Penelitian Asosiatif atau Hubungan

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Yaitu bertujuan untuk memperoleh data yang mampu memberikana gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi yang terjadi pada tempat unit penelitian yang akan dilakukan

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yang Beralamat di Jalan K.H Ahmad Dahlan Lt. 2 Bukit Kecil Palembang. Telp (0711) 352249.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi bagaimana variabel itu diukur.

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya targe penerimaan Retribusi Pasar	Hal-hal apa saja yang menjadi bagian atau yang menyatakan tidak tercapainya realisasi atau suatu tujuan yang ingin dicapai.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya pegawai 2) Sistem pengelolaan retribusi pasar 3) Belum efektifnya pemberlakuan sanksi 4) Adanya pungutan liar.
Faktor Internal	Suatu keadaan yang menyatakan dan menggambarkan terjadinya selisih target penerimaan retribusi pasar yang ditetapkan oleh lingkungan dan dalam perusahaan itu sendiri.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Organisasi dan perencanaan 2) Peraturan daerah, sistem prosedur 3) Koordinasi dan kemampuan personil 4) Analisa dan pengawasan 5) Sarana dan prasarana yang dimiliki 6) Sanksi bagi wajib pajak atau retribusi 7) Data dasar

Faktor External	Suatu keadaan yang menyatakan dan menggambarkan terjadinya selisih target penerimaan retribusi pasar yang ditetapkan oleh lingkungan dan luar perusahaan itu sendiri.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kesadaran wajib pajak /wajib retribusi daerah 2) Pertumbuhan objek penerimaan 3) Perekonomian daerah 4) Kebijakan pemerintah 5) Kondisi objek penerimaan
Faktor yang paling dominan yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar.	Hal-hal yang paling dominan yang menyebabkan tidak tercapainya target atau sesuatu yang ingin dicapai.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya pegawai 2) Sistem pengelolaan retribusi pasar 3) Belum efektifnya pemberlakuan sanksi 4) Adanya pungutan liar.

Sumber : Penulis, 2011

D. Data yang Digunakan

Menurut Husein Umar (2003 : 42) bahwa data terbagi menjadi dua yaitu :

1) Data Primer

Data Primer merupakan sumber dari penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara langsung dengan kepala



Ferusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dan karyawan bagian lainnya yang menyangkut dengan pemungutan retribusi pasar.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sejarah Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya
- b. Struktur organisasi dan pembagian tugas Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya
- c. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya
- d. Peraturan Daerah (PERDA) Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya tentang Retribusi Pasar
- e. Anggaran dan Realisasi penerimaan hasil tagihan retribusi pasar Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin dalam buku W. Gulo (2002 : 115-123) teknik pengumpulan data dibagi menjadi :

1) Pengamatan (Observasi)

Pengamatan adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2) Survei

Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Pemerintah Kota Palembang memiliki 19 Dinas salah satunya adalah Dinas Pasar. Pada saat ini sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan Kota Palembang dan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat, mengakibatkan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan akan barang dagangan terutama pada komoditi kebutuhan rumah tangga, hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan pengurusan pasar dalam Kota Palembang, maka dengan ini Pemerintah Kota Palembang perlu mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan Pasar-pasar milik Pemerintah Kota Palembang. Pengurusan dan pengelolaan pasar yang selama ini dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Daerah dirasakan perlu dikelola secara lebih efektif dan professional dengan pembentukan Perusahaan Daerah, sejalan dengan ketentuan pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Peraturan Daerah dan berdasarkan Prinsip-prinsip Ekonomi Perusahaan.

Tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 Dinas Pasar resmi menjadi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Jaya dan Walikota Palembang.

2. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas, Fungsi dan Wewenang Serta Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya

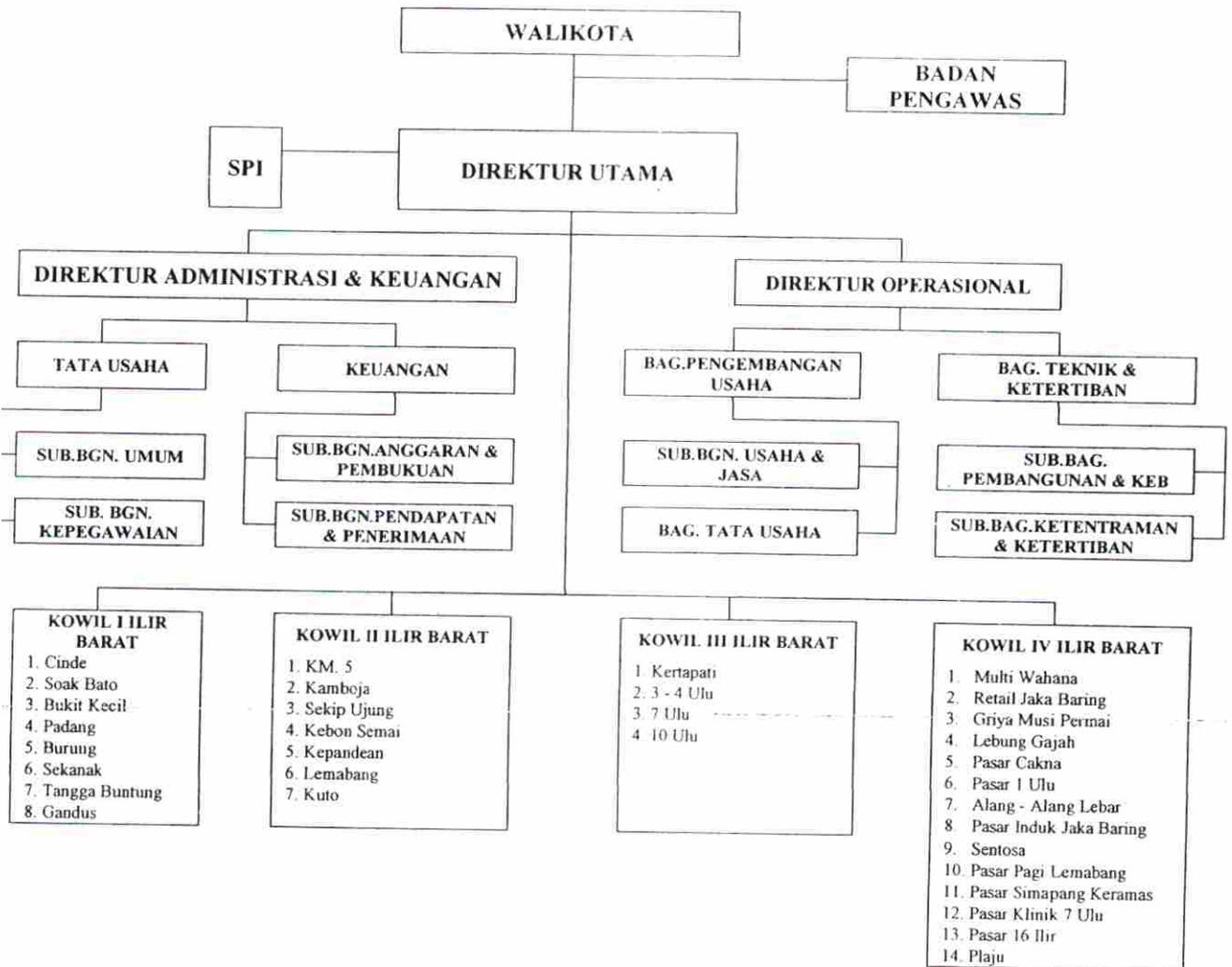
a. Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya

Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Palembang

Jaya Dapat dilihat pada Gambar IV.1 berikut :

- 1) Badan Pengawasan
- 2) Direktur Utama
- 3) Direktur Administrasi dan Keuangan
- 4) Direktur Operasional
- 5) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Kepegawaian
- 6) Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Anggaran dan Pembukuan
 - b) Sub Bagian Pendapatan dan Penerimaan

Gambar IV. 1
STUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA



Sumber: Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, 2011

- 7) Bagian Pengembangan Usaha, Terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Usaha dan Jasa
 - b) Sub Bagian dan Pemasaran
- 8) Bagian Teknik dan Tramtib, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembangunan dan Kebersihan
 - b) Sub Bagian Ketentraman
- 9) Satuan Pengawasan Intern

**b. Uraian Tugas, Fungsi dan Wewenang Perusahaan Daerah
Pasar Palembang Jaya**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur organisasi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Kota Palembang adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

Berikut adalah uraian tugas, fungsi dan wewenang Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya :

- 1) Badan Pengawasan
 - a) Tugas
 - (1) Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan tugas Direksi

- (2) Memberikan saran dan pendapat kepada walikota terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian direksi
- (3) Memberikan saran dan pendapat kepada walikota terhadap program kerja dan anggaran tahunan yang diajukan
- (4) Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota terhadap perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah
- (5) Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain

Berdasarkan uraian mengenai tugas Badan Pengawasan dapat disimpulkan bahwa, tugas Badan Pengawasan adalah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang ada di Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dan memberikan saran-saran terhadap program kerja tahunan

b) Wewenang

- (1) Mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan Daerah
- (2) Memberikan peringatan atau teguran kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas yang sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disahkan atau disetujui perubahannya
- (3) Melaksanakan pemeriksaan terhadap Direksi yang diduga telah merugikan Perusahaan Daerah Pasar

- (4) Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan Rencana Kerja Direksi tahun berjalan
- (5) Memberikan persetujuan terhadap usulan besarnya gaji dan tunjangan Direksi
- (6) Memberikan persetujuan terhadap usulan cuti yang diajukan Direksi

Berdasarkan uraian mengenai wewenang Badan Pengawas dapat disimpulkan bahwa, wewenang Badan Pengawas adalah mengesahkan, memeriksa, menerima atau menolak dan memberikan persetujuan usulan yang diajukan kepada Badan Pengawasan

2) Direktur Utama

a) Tugas

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan program kerja Perusahaan Daerah, mengelola kekayaan Perusahaan Daerah serta menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Walikota melalui Badan.

b) Fungsi

- (1) Peranan dan penetapan program kerja Perusahaan Daerah serta pengelolaan kekayaan Perusahaan Daerah
- (2) Pengusulan tarif jasa pengelolaan pasar kepada Walikota melalui Badan Pengawas

- (3) Penyusunan dan pengajuan rencana anggaran tahunan Perusahaan Daerah
- (4) Penyusunan perubahan atau tambahan anggaran yang terjadi dalam tahun berjalan
- (5) Penyusunan laporan keuangan dan kegiatan Perusahaan Daerah secara periodik
- (6) Penyampaian perhitungan tahunan setiap tahun buku, berupa neraca laporan arus kas dan daftar rugi atau laba kepada Walikota melalui Badan Pengawasan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan kepegawaian Perusahaan Daerah yang berlaku
- (8) Peningkatan dan pengembangan kemampuan pegawai Perusahaan Daerah
- (9) Pelaksanaan kerjasama dengan instansi Pemerintahan maupun swasta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (10) Penandatanganan kontrak, cek dan lain-lain dokumen Perusahaan Daerah

Berdasarkan uraian mengenai fungsi Direktur Utama dapat disimpulkan bahwa, fungsi Direktur Utama adalah perencanaan dan menetapkan program kerja, mengusulkan tarif jasa



pengelolaan, menyusun laporan keuangan dan menandatangani kontrak dan cheque Perusahaan Daerah.

3. Direktur Administrasi dan Keuangan

a) Tugas

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan, pelaksanaan kebijakan strategis dibidang administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat dan pengelolaan keuangan serta kekayaan Perusahaan Daerah

b) Fungsi

- (1) Perencanaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah
- (2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha dan Bagian Keuangan
- (3) Pelaksanaan tugas-tugas administrasi umum
- (4) Penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian
- (5) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan
- (6) Penyusunan inventarisasi barang milik Perusahaan Daerah

Berdasarkan uraian mengenai fungsi Direktur Administrasi dan Keuangan dapat disimpulkan bahwa, fungsi Direktur Administrasi dan Keuangan adalah perencanaan dan pengendalian sumber pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah, pelaksanaan

urusan kerumahtanggaan dan menyusun inventarisasi barang milik Perusahaan Daerah.

4) Direktur Operasional

a) Tugas

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kegiatan strategis dibidang pengelolaan dan pemanfaatan pasar serta pemberian fasilitas dalam rangka pengembangan potensi perpasaran daerah

b) Fungsi

- (1) Penyusunan program dan rencana kerja Perusahaan Daerah
- (2) Pengkoordinasi pelaksanaan tugas Bagian Pengembangan Usaha serta Bagian Teknik dan Keamanan dan Ketertiban
- (3) Pelaksanaan Pengelolaan dan pemanfaatan pasar
- (4) Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kelancaran sistem mekanisme kegiatan operasional Perusahaan Daerah
- (5) Pemberian fasilitas dan perizinan dalam rangka pengembangan potensi perpasaran
- (6) Pelaksanaan peningkatan, pemeliharaan, pengawasan sarana dan prasarana pasar
- (7) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama

Berdasarkan uraian mengenai fungsi Direktur Operasional dapat

disimpulkan bahwa, fungsi Direktur Operasional adalah mengkoordinasi, mengelola pasar dan pemanfaatan pasar, pemberian fasilitas dan perizinan dan pengawasan kelancaran sistem mekanisme kegiatan operasional Perusahaan Daerah.

5) Bagian Tata Usaha

a) Tugas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan meliputi urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, protocol, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, urusan rumah tangga dan urusan kepegawaian

b) Fungsi

- (1) Penyusunan program dan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha
- (2) Pelaksanaan operasional pengelolaan urusan administrasi surat menyurat
- (3) Penataan kearsipan
- (4) Pelaksanaan kegiatan protokol dan kehumasan
- (5) Penyelenggaraan urusan rumah tangga
- (6) Penyelenggaraan kegiatan yang menyangkut hukum, organisai dan tatalaksana
- (7) Penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengadaannya

Berdasarkan uraian mengenai fungsi Bagian Tata Usaha dapat disimpulkan bahwa, fungsi Bagian Tata Usaha adalah



melaksanakan operasional-pengelolaan urusan administrasi surat menyurat, arsip dan menyelenggarakan kegiatan menyangkut hukum, organisasi dan tatalaksana.

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum

1) Tugas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, protokol, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, dan tatalaksana urusan rumah tangga serta perlengkapan

2) Fungsi

(a) Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum

(b) Pelaksanaan operasional pengelolaan urusan administrasi surat menyurat

(c) Penataan arsip

(d) Pelaksanaan kegiatan protokol dan kehumasan

(e) Penyelenggaraan urusan rumah tangga

(f) Penyelenggaraan kegiatan yang menyangkut hukum, organisasi dan tatalaksana

Berdasarkan uraian mengenai fungsi Sub Bagian Umum

dapat disimpulkan bahwa, fungsi Sub Bagian Umum adalah menyusun program dan rencana kebagian Sub Bagian Umum, melaksanakan kegiatan protikol dan kehumasan.

b) Sub Bagian Kepegawaian

1) Tugas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai meliputi pengangkatan dan pemberhentian pegawai, alih tugas, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, daftar urut kepangkatan, daftar gaji. Absensi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, asuransi, dan pembinaan serta pendidikan dan latihan pegawai Perusahaan Daerah

2) Fungsi

- (a) Penyusunan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian
- (b) Penataan administrasi dan arsip kepegawaian
- (c) Perencanaan formasi pegawai
- (d) Pengusulan kepada Direksi mengenai penerimaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian dan mutasi pegawai di lingkungan Perusahaan Daerah
- (e) Pengusulan kepada Direksi dan pengurusan administrasi mengenai penerimaan, pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian pegawai honor atau kontrak

(f) Penyusunan daftar urut kepangkatan dan daftar gaji

(g) Penyusunan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan

Berdasarkan uraian mengenai fungsi Sub Bagian Kepegawaian dapat disimpulkan bahwa, fungsi Sub Bagian Kepegawaian adalah menata administrasi, merencanakan formasi pegawai, menyusun daftar urut kepangkatan, penilain pelaksanaan pekerjaan.

6) Bagian Keuangan

a) Tugas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, penagihan, penerimaan, penyimpanan, dan pengamanan uang serta surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah

b) Fungsi

(1) Penyusunan rencana kerja dan kegiatan Bagian Keuangan

(2) Penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah

(3) Pelaksanaan operasionalisasi administrasi anggaran

(4) Pembuatan jurnal dan pembukuan bukti kas masuk, bukti kas keluar dan bukti memorial sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(5) Penyusunan laporan keuangan baik bulanan, triwulan dan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan arus kas,

- perhitungan rugi/laba, perubahan modal dan informasi keuangan lainnya
- (6) Pembukuan administrasi penyediaan barang berharga dan barang cetakan lainnya
- (7) Pembukuan investaris dan pembuatan daftar penyusutannya
- (8) Pembukuan bukti setoran bank dan unit-unit pasar dan penerimaan lainnya kepada bank yang ditunjuk.

Berdasarkan uraian mengenai fungsi Bagian Keuangan dapat disimpulkan bahwa, fungsi Bagian Keuangan adalah menyusun rencana kerja, menyusun anggaran pendapatan dan belanja, membuat jurnal, dan pembukuan setoran bank dari unit-unit pasar.

Bagian Keuangan terdiri dari : Sub Bagian Anggaran dan Pembukuan

1) Tugas

Mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah serta melaksanakan penerimaan dan pembukuan bukti bukti kas masuk, bukti kas keluar dan bukti memorial

2) Fungsi

- (a) Penyusunan rencana kerja dan kegiatan Bagian Keuangan

- (b) Pengumpulan dan penyusunan data anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah
- (c) Penghimpunan dan pengusulan Realisasi Anggaran Tahunan
- (d) Pembuatan skala prioritas anggaran
- (e) Pelaksanaan operasionalisasi administrasi anggaran

Berdasarkan uraian mengenai fungsi Sub Bagian Anggaran dan Pembukuan dapat disimpulkan bahwa, fungsi Sub Bagian Anggaran dan Pembukuan adalah menyusun anggaran, mengumpulkan dan menyusun data anggaran pendapatan dan belanja, menghimpun dan mengusulkan realisasi anggaran tahunan.

b) Sub Bagian Pendapatan dan Retribusi

1) Tugas

Mempunyai tugas pokok menerima, menghimpun setoran jasa pengelolaan pasar dan pembukuan bukti keuangan kas yang meliputi bukti setoran penerimaan bukti pengeluaran kas dan bank

2) Fungsi

- (a) Penyusunan rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Pendapatan dan Retribusi
- (b) Pelaksanaan penerimaan jasa pengelolaan pasar dan pendapatan lain-lain

- (c) Pelaksanaan pendataan terhadap objek-objek pendapatan Perusahaan Daerah
- (d) Pelaksanaan penatausahaan, penerimaan jasa pengelolaan pasar
- (e) Pengumpulan dan pengelolaan sumber pendapatan dan penerimaan Perusahaan Daerah.

Berdasarkan uraian mengenai fungsi Sub Bagian Pendapatan dan Retribusi dapat disimpulkan bahwa fungsi Sub Bagian Pendapatan dan Retribusi adalah melaksanakan penerimaan jasa pengelolaan, pendataan terhadap objek-objek pendapatan dan melaksanakan penatausahaan.

7) Bagian Pengembangan Usaha

a) Tugas

Mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis operasional sebagai bentuk penjabaran kebijakan strategis Direksi dibidang pengembangan usaha dan jasa serta pemberian perizinan dan pemasaran

b) Fungsi

- (1) Penyusunan rencana kerja dan program Perusahaan Daerah
- (2) Pelaksanaan pendataan dan penyebaran informasi dibidang pasar
- (3) Pelaksanaan analisa potensi pasar untuk direalisasikan menjadi pendapatan



- (4) Penyusunan rencana usaha perusahaan dalam meningkatkan pendapatan
- (5) Pelaksanaan kerja sama dengan instansi Pemerintahan dan atau swasta dalam rangka pengembangan dan penganekaragaman usaha
- (6) Pemberian pelayanan perizinan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan
Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemasaran tempat berjualan dipasar

Berdasarkan uraian mengenai fungsi Bagian Pengembangan Usaha dapat disimpulkan bahwa fungsi Bagian Pengembangan Usaha adalah melaksanakan pendataan, analisa potensi pasar, memberikan pelayanan perizinan bagi masyarakat yang ingin berjualan dipasar.

8) Bagian Teknik dan Ketertiban

a) Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, penataan dan pengawasan pasar serta menjaga keamanan dan ketertiban

b) Fungsi

- (1) Penyusunan rencana kerja Bagian Teknik dan Ketertiban
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan pasar

- (3) Pembuatan *study* kelayakan pembangunan pasar dan instalasi listrik
- (4) Perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas perpasaran
- (5) Pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana pasar
- (6) Pemberian pelayanan keamanan dan ketertiban pasar

Berdasarkan uraian mengenai fungsi Bagian Teknik dan Ketertiban dapat disimpulkan bahwa fungsi Bagian Teknik dan Ketertiban adalah menyusun rencana kerja bagian teknik dan ketertiban, memelihara kebersihan sarana dan prasarana pasar, memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban pasar.

Bagian Teknik dan Ketertiban terdiri dari :

a) Sub Bagian Pembangunan dan Ketertiban

1) Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan penataan dan pengawasan bangunan pasar serta melaksanakan kebersihan pasar secara menyeluruh

2) Fungsi

- (a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang pembangunan dan pemeliharaan pasar
- (b) Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan pasar

(c) Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan pasar

(d) Pembuatan study kelayakan pembangunan pasar dan instalasi listrik

Berdasarkan uraian mengenai fungsi Sub Bagian Pembangunan dan Ketertibandapat disimpulkan bahwa fungsi Sub Bagian Pembangunan dan Ketertiban adalah melaksanakan kegiatan pengembangan pasar, memelihara dan perbaikan pasar dan membuat study kelayakan pembangunan pasar.

b) Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban

1) Tugas

Melaksanakan program pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar

2) Fungsi

(a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang keamanan dan ketertiban

(b) Pemberian pelayanan keamanan dan ketertiban pasar

(c) Pengaturan terhadap perparkiran dilingkungan pasar dan kegiatan bongkar muat barang

(d) Pengaturan terhadap penempatan barang dagangan

(e) Pengendalian pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima

Berdasarkan uraian mengenai fungsi Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban dapat disimpulkan bahwa fungsi Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban adalah menyusun rencana dibidang keamanan dan ketertiban, mengatur perpakiran, mengatur penempatan barang dan memberikan pembinaan terhadap pedagang kaki lima

9) Bagian Pengawasan Intern

a) Tugas

Mempunyai tugas pokok dibidang pengawasan, pemeriksaan, koordinasi dan evaluasi intern Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b) Fungsi

- (1) Penyusunan program pemeriksaan tahunan untuk mengevaluasi realisasi pendapatan dan pengeluaran Perusahaan Daerah
- (2) Pengawasan dan pengendalian secara administrasi semua harta kekayaan baik material maupun keuangan Perusahaan Daerah dan menyarankan tindakan penyelesaian jika terjadi penyimpangan

Berdasarkan uraian mengenai fungsi Satuan Pengawasan Intern dapat disimpulkan bahwa, fungsi Satuan Pengawasan Intern adalah menyusun program pemeriksaan tahunan, mengawasi dan mengendalikan secara administrasi semua harta kekayaan baik

- material maupun keuangan Perusahaan Daerah dan menyarankan tindakan penyelesaian jika terjadi penyimpangan.

c. Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi serta Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan koordinator wilayah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal sesuai dengan tugasnya
- 2) Direktur utama, Direktur Administrasi, Direktur Operasional, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan koordinasi lapangan wajib melaksanakan pengawasan terhadap para bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan wajib segera mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya

a) Visi

Visi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya adalah

“Menjadikan pasar tradisional yang nyaman, aman dan berkualitas sebagai sarana penggerak perekonomian daerah kota Palembang”.

b) Misi

Misi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya adalah

1. Mempersiapkan sumber daya manusia yang professional, berakhlak dan bermodal sebagai salah satu faktor menunjang manajemen modern PD Pasar Palembang Jaya
2. Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas Pasar Tradisional yang lengkap, berkualitas, bersih, rapi dan indah, sehat dan berwawasan lingkungan
3. Menyediakan kebutuhan barang dan jasa yang cukup, segar, murah dan berdaya saing
4. Tersedia aturan yang mantap untuk mendukung segenap aktifitas kegiatan perpasaran di Kota Palembang
5. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas pasar tradisional dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6. Meningkatkan rasa aman dan nyaman baik pedagang, pembeli dan masyarakat

4. Aktifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya

Aktifitas pengelolaan retribusi pasar Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yaitu, dimulai dari pendapatan objek dan subjek retribusi pasar, menentukan besarnya tarif retribusi pasar, kemudian baru dapat dilaksanakan pemungutan retribusi pasar kepada pedagang yang menggunakan fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah, hasil

dari pemungutan retribusi pasar tersebut kemudian disetorkan ke Bendaharawan khusus penerima bukti setoran.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dilakukan Kepala Unit Pasar dengan menunjukkan pemungut retribusi pasar yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga kerja honorer yang ada dilingkup Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. Para petugas pemungut retribusi pasar tersebut dilengkapi dengan seragam dan tanda pengenal.

5. Jenis atau Pengelompokan Pasar dan Kondisi Pasar Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya

a. Jenis atau pengelompokan pasar Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya

Menurut peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang pengelolaan pasar dalam Kota Palembang, Jenis pengelompokan pasar terdiri dari :

1) Menurut Kegiatan

- a) Pasar eceran adalah pasar yang kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan jasa secara eceran
- b) Pasar grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dalam jumlah besar



- c) Pasar induk adalah pasar dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan dan pusat penyimpanan bahan pangan sementara untuk disalurkan ke pasar-pasar lainnya
- 2) Menurut waktu kegiatan
- a) Pasar siang hari adalah pasar yang dalam kegiatannya berlangsung pada siang hari
 - b) Pasar malam hari adalah pasar yang dalam kegiatannya berlangsung pada malam hari
 - c) Pasar siang malam adalah pasar yang didalam kegiatannya berlangsung pada siang dan malam.
- 3) Menurut sifatnya
- Pasar khusus adalah tempat berjualan sementara yang dipergunakan oleh pedagang tidak tetap dalam kegiatan keramaian
- 4) Menurut klasifikasinya
- a) Klasifikasi A
 - b) Klasifikasi B
 - c) Klasifikasi C
 - d) Klasifikasi D

Tabel IV.1
Nama Pasar dan Alamatnya

No	Nama Pasar	Alamat
1	Pasar Cinde	Jl. Jend. Sudirman
2	Pasar Soak Bato	Jl. Merdeka
3	Pasar Padang Selasa	Jl. Srijaya Negara
4	Pasar Bukit Kecil	Jl. KH A.Dahlan
5	Pasar Burung	Jl. Karet
6	Pasar Sekanak	Jl. Sekanak
7	Pasar Tg. Burung	Jl. Ki Gede Ing Lautan
8	Pasar Gandus	Jl. Sofyan Kenawas
9	Pasar KM5	Jl. Kol. Burlian
10	Pasar Kamboja	Jl. May. Santoso
11	Pasar Kepadean	Jl. TP Rustam Effendy
12	Pasar 16 Ilir	Jl. Pasar 16 Ilir
13	Pasar sekip Ujung	Jl. Amphibi
14	Pasar Kebon Semai	Jl. May Salim Batu Bara
15	Pasar Kuto	Jl. Slamet Riyadi
16	Pasar Lemabang	Jl. Ratu Sianum
17	Pasar Kertapati	Jl. KH Wahid Hasyim
18	Pasar 3-4 Ulu	Jl. KH. M. Asyik
19	Pasar 7 Ulu	Jl. KHA Azhari
20	Pasar 10 Ulu	Jl. KHA Azhari
21	Pasar Retail Jakabaring	Jl. Pangeran Ratu Palembang
22	Pasar Alang-alang Lebar	Jl. Raya Palembang-Betung KM 12
23	Pasar Griya Musi Permai	Jl. Siaran Kec. Sako
24	Pasar Multi Wahana	Jl. Siaran Kec. Sako
25	Pasar Lebung Gajah	Jl. Siaran Kec. Sako
26	Pasar Cakna	Jl. KH. Azhari Kec. SU 1
27	Pasar 1 Ulu	Jl. KH. Azhari Kec. SU 1
28	Pasar Sentosa	Jl. A. Yani Kec. Plaju
29	Pasar Simpang Keramasan	Jl. Sungki Kec. Kertapati
30	Pasar Tradisional Modem Plaju	Jl. Pintu Besi Kel. Plaju
31	Pasar Induk Jakabaring	Jl. Pangeran Ratu Palembang
32	Pasar Yada	Jl. Taqwa Mata Merah Kec. Kalidoni
33	Pasar Buah	Jl. Pangeran Ratu Palembang

Sumber : *Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, 2011*

b. Kondisi Pasar Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya

Kondisi Pasar Tradisional yang meliputi jumlah petak atau los dan jumlah pedagang dapat dilihat pada tabel IV. 2 berikut ini :

Tabel IV. 2
Kondisi Pasar Tradisional Kota Palembang
Tahun 2010

No	Pasar	Petak	Los	Hamparan	Jumlah	Ket.
1	KM5	287	105	0	392	900 M ²
2	KAMBOJA	32	38	50	120	130 M ²
3	2KEPANDEAN	0	0	0	0	0
4	16 ILIR	1.634	439	1.148	3.221	150 M ²
5	SEKIP UJUNG	83	111	12	206	75 M ²
6	KEBON SEMAI	168	10	0	178	40 M ²
7	LEMABANG	434	0	110	544	10 M ²
8	KUTO	267	26	150	443	224 M ²
9	CINDE	703	18	0	721	145 M ²
10	SOAK BATO	134	43	50	227	-
11	PADANG SELASA	24	73	0	97	180 M ²
12	BUKIT KECIL	125	53	0	178	50 M ²
13	BURUNG	51	0	10	61	-
14	SEKANAK	264	42	0	306	289 M ²
15	TANGGA BUNTUNG	93	99	5	197	-
16	GANDUS	16	0	30	46	-
17	KERTAPATI	303	151	0	454	125 M ²
18	3-4 ULU	118	48	52	218	225 M ²
19	7 ULU	524	144	9	677	-
20	10 ULU	493	100	60	653	105 M ²
21	PLAJU	412	401	25	838	45 M ²
22	RETAIL JAKABARING	34	128	1.760	1.922	2.400M ²
23	ALANG-ALANG LEBAR	15	34	408	457	600 M ²
24	MULTI WAHANA	480	142	70	692	-
25	GRIYA MUSI PERMAI	101	0	154	255	-
26	LEBUNG GAJAH	4	150	0	154	-
27	SENTOSA	0	0	80	80	-
28	1 ULU	0	20	30	50	-
29	CAKNA	0	42	58	100	-
30	SIMP. IV TLNG BETUTU	20	40	20	80	-
	JUMLAH. . . .	6.819	2.457	4.291	13.567	5.693M ²

Sumber : Direktorat Operasional PD Pasar Palembang Jaya. 2011

c. **Retribusi Pasar Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya**

Pemungutan **Retribusi Pasar** Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya diatur dalam peraturan daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemungutan dan tarif retribusi pasar.

1) **Pemungutan **Retribusi Pasar****

Pemungutan **Retribusi Pasar** Kota Palembang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya melalui unit Pasar yang ada terdiri dari Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga Honoer yang dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sekolah menengah Atas (SMA). Para petugas yang memungut retribusi pasar dilengkapi dengan seragam dan tanda pengenal. **Retribusi pasar** dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi pasar yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dan dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis, kupon, surat perjanjian sewa dan kartu langganan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pemungutan **Retribusi Pasar** ini tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintahan Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pemungutan **Retribusi Pasar** atas sewa tempat berjualan dilakukan paling lambat tanggal 10. Pemungutan **Retribusi Pasar** atas pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan

dilakukan setiap hari. Kepada pedagang diberikan karcis sebagai tanda bukti Pembayaran Retribusi Pasar. Biaya pemungutan retribusi pasar ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari hasil penerimaan Retribusi Pasar. Tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari Retribusi Pasar yang terhutang atau yang kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah setelah terlebih dahulu disampaikan Surat Peringatan.

2) Penentuan besarnya tarif retribusi pasar Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya

Penentuan besarnya tarif retribusi pasar Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya ditetapkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Kota Palembang. Bagi para pedagang yang menggunakan fasilitas yang disediakan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya harus membayar tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mendapatkan hak sewa tempat berjualan berupa petak atau los yang baru dibangun oleh Pemerintah Daerah dipungut biaya 20% kali nilai taksiran dari harga petak atau los ditambah 5x. untuk mendapatkan hak sewa tempat berjualan berupa petak atau los akibat pemutusan hubungan dengan Pihak Pertama dipungut biaya 10% di kali



nilai taksir dari harga jual petak atau los ditambah 5x sewa perbulan.

Adapun tarif retribusi pasar yang ditentukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya ditetapkan berdasarkan luas tempat berjualan, jenis pedagang dan kelas pasar. Tarif sewa tempat berjualan per-bulan ditetapkan berdasarkan tabel sebagai berikut :

a) Untuk los dan Kios

Tabel IV.3
Besarnya Tarif Retribusi Pasar yang Ditetapkan
Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya

No	Kelas pasar	TARIF BULANAN PERMETER (M) JENIS DAGANGAN		
		Logam mulia, Sembako, Onderdil, Elektronik, Jasa Perkantoran, Salon, Wartel, Warung makan/Restoran, Percetakan, Photocopy, Rental Komputer, Rokok Dll.	Pakaian jadi, Tekstil, Kelontongan, Sandal/Sepatu, Tas/Koper, Obat dan Alat Kesehatan, Alat- alat dan Bahan- bahan pertanian, Alat tulis, Kosmetik, Penjahait, Optok/Kacamata, Alat-alatdan Perlengkapan Olaraga dan Musik, Bahan Bangunan, Jual makanan, Perhiasan Imitasi Dll.	Sayuran, Buah-buahan, Daging, Unggas, Ikan, Kelapa, Rempah- rempah.
I	II	III	IV	V
1.	Kelas A Lantai I Lantai II Lantai III	(Rp) 21.000 19.500 18.500	(Rp) 20.500 19.000 17.500	(Rp) 20.000 18.500 16.500
2.	Kelas B Lantai I Lantai II	(Rp) 18.500 6.000	(Rp) 17.500 5.000	(Rp) 16.500 4.000
3.	Kelas C Lantai I Lantai II	(Rp) 16.000 14.200	(Rp) 14.800 13.800	(Rp) 14.200 13.500
4.	Kelas D Lantai I	(Rp) 14.000	(Rp) 13.500	(Rp) 13.000

Sumber : Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, 2011

- b) Tarif parkir Rp.1.000 1 kali parkir
- c) Tarif Wc Rp.1.000 1 kali pakai
- d) Listrik Rp.10.000/watt perbulan

Untuk pemakaian listrik pada setiap unit tempat berjualan akan dipungut biaya sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh PLN dengan ditambah toesleg sebesar Rp. 2500 setiap bulan.

- e) Tempat berjualan ditanah pasar terbuka yang dipakai secara tidak tetap yang luasnya tidak lebih dari 1,5 m x 1,5 m dipungut retribusi harian sebesar 3.000/hari.
- f) Tempat berjualan ditanah pasar terbuka yang dipakai secara tetap yang luasnya tidak lebih dari 1,5 m x 1,5 m dipungut retribusi harian sebesar 50.000/bulan.
- g) Retribusi tempat yang menempati kios, los, pelantaran, sebesar Rp. 50.000/bulan.
- h) Retribusi kebersihan dan ketertiban sebesar Rp.2.000/hari.

Dilihat dari uraian tarif yang ada diatas yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang karena tarif yang ditetapkan masih relatif rendah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pasar yang baru. Dari hal tersebut berdampak pada penerimaan retribusi pasar yang dapat menyebabkan tidak

tercapainya target sehingga dapat meningkatkan retribusi daerah. Dalam hal ini sebaiknya Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya melakukan perubahan dalam menentukan tarif retribusi pasar.

3) Data Target dan Realisasi Anggaran Retribusi Pasar

Target dan Realisasi Anggaran Retribusi Pasar Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Tahun Anggaran 2006 s/d 2010 dapat dilihat pada tabel I.1.

B. PEMBAHASAN

Retribusi pasar merupakan salah satu unsur penting dalam penerimaan retribusi daerah dalam membiayai pembangunan daerah dewasa ini. Pemerintah daerah didorong untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan retribusi daerah dengan maksud agar subsidi dari Pemerintah Pusat dapat dikurangi. Pemerintah Daerah diharapkan memiliki sumber-sumber penerimaan retribusi daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah daerah dan bangunan daerah, sehingga dimasa yang akan datang diharapkan Retribusi daerah dapat diandalkan sebagai sumber utama dalam pembiayaan daerah.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya dan mengacu Undang-undang Nomor 66 Tahun 2001, maka sumber Retribusi Daerah terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Salah satu sumber penerimaan Retribusi Daerah adalah Retribusi pasar yang tergolong didalam retribusi jasa umum. Pelaksanaan Retribusi Pasar diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2003. Menurut penjelasan Peraturan Daerah tersebut diatas pada pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa :

“ Retribusi Daerah adalah pungutan yang dikenakan kepada penyewa tempat berjualan”.

Permasalahan yang timbul dalam penerimaan Retribusi Pasar adalah pertumbuhan jumlah pedagang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel IV.2 dapat dilihat pertumbuhan pedagang dari tahun 2006 sampai tahun 2010 mengalami pertumbuhan yang cukup berarti, pertumbuhan tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan Retribusi Pasar dalam meningkatkan Retribusi Daerah. Namun bila dilihat dari tabel 1.1, bahwa pada tahun 2006 persentase penerimaan retribusi pasar hanya mencapai 5.98%, pada tahun 2007 tingkat pencapaiannya sebesar 7.09%, pada tahun 2008 mencapai 9.84%, pada tahun 2009 mencapai 3.36%, dan tahun 2010 mencapai 3.87%, dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Selama 5 Tahun belakang Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Tidak dapat Mencapai Target yang telah ditetapkan Pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik menarik judul “ Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya”.

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka pembahasan mengenai Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar akan diuraikan sebagai berikut :

target retribusi pasar pada Tahun 2006 adalah Rp. 2.720.938.468 sedangkan realisasinya Rp. 2.558.154.338 dengan selisih Rp. 162.784.130 dan tingkat pencapaiannya sebesar 5.98% dan pada tahun 2007 target

retribusi pasar sebesar Rp.3.192.884.075 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp.2.966.417.997 dengan selisih Rp.226.446.078 atau 7.09% sedangkan pada Tahun 2008 target yang ditetapkan sebesar Rp.3.374.768.925 dan realisasinya sebesar Rp.3.042.381.788 dengan selisih Rp.332.387.137 atau 9.84% dan pada Tahun 2009 target retribusi pasar ditetapkan sebesar Rp.5.542.877.955 dan realisasinya sebesar Rp.5.356.488.272 dengan selisih Rp.186.389.683 atau 3.36% dan pada Tahun 2010 target retribusi yang ditetapkan sebesar Rp.6.190.955.916 dan realisasinya sebesar Rp.5.954.117.438 dengan selisih Rp.236.838.478 atau 9.87%. Itu menunjukkan bahwa Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah tersebut.

1. Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya terjadi karena 2 Faktor sebagai berikut :

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan suatu keadaan yang menyatakan dan menggambarkan terjadinya selisih target penerimaan retribusi yang ditetapkan oleh lingkungan dan dalam perusahaan itu sendiri, Faktor Internal secara umum yang ada di dalam Perusahaan Daerah Pasar yaitu Organisasi dan Perencanaan, Peraturan Daerah sisten prosedur, koordinasi dan kemampuan personil, analisis dan pengawasan, sarana dan prasarana yang dimiliki, sanksi bagi wajib pajak atau



retribusi, dan data dasar. Dan faktor internal yang saat ini di alami Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yaitu :

a. Kurangnya Pegawai Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya

Dari hasil wawancara langsung kepada bagian Pengembangan Usaha dan Bagian Teknik dan Ketertibsn bahwa Kurangnya Pegawai Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi rendahnya penerimaan retribusi pasar yang diterima oleh Perusahaan Daerah Pasar dari setoran yang dilakukan oleh pihak unit pasar yang ditugaskan melakukan pemungutan retribusi kepada masyarakat pengguna jasa fasilitas pasar.

Pada tabel IV.2 dan struktur organisasi yang telah dibahas sebelumnya dapat diketahui dari data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pegawai yang ditugaskan dari perusahaan daerah pasar untuk mengawasi pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh petugas unit pasar. Sehingga tidak bisa dikatakan benar atau salah jumlah yang disetorkan oleh unit pasar keperusahaan daerah pasar. Dengan demikian, sebaiknya Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya melakukan penambahan pegawai/karyawan yang akan ditugaskan pada bagian pengawasan dalam penerimaan/pemungutan retribusi pasar.

Dengan ditambahkan pegawai pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yang akan ditugaskan dari perusahaan daerah untuk melakukan pengawasan pemungutan retribusi, dapat diharapkan dapat membantu upaya dalam peningkatan target retribusi pasar yang telah ditetapkan.

b. Sistem Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar

Hasil pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh petugas harus disetor pemungut dan harus disetor secara bruto (belum dipotong dengan biaya pemungutan) kepada bendaharawan khusus penerima bukti setor pada setiap unit pasar. Selanjutnya bendaharawan khusus penerima bukti setor pada setiap unit pasar menyetorkannya kepada bendaharawan khusus penerima bukti setor Perusahaan Daerah Pasar yang setiap hari dilakukannya pemungutan. Bendaharawan khusus penerima bukti setor perusahaan daerah pasar selambat-lambatnya satu hari kerja, sesudah penerimaan hasil pemungutan retribusi pasar tersebut kepada dinas pendapatan kota Palembang.

Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dimana pengendaliannya belum optimal, dikarenakan pihak Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Tidak mempunyai data pembanding untuk dapat menyimpulkan tingkat kewajaran pembayaran retribusi pasar yang dilakukan oleh pengguna jasa

melalui unit pasar, sehingga menyebabkan penurunan retribusi pasar Kota Palembang dan menunjukkan hasil yang kurang baik. Perbaikan system pengolahan harus mendapat perhatian penting untuk mendapat tingkat pencapaian penerimaan retribusi yang tinggi. Untuk dapat menyimpulkan tingkat kewajaran pembayaran retribusi pasar yang dilakukan oleh pengguna jasa melalui unit pasar, supaya dalam pemungutan retribusi pasar tidak terjadi kesalahan, maka Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya maupun unit pasar yang ada sekarang harus ditingkatkan atau diberikan pelatihan khusus kepada petugas retribusi pasar dan apabila masih ada petugas dari retribusi pasar Kota Palembang maupun unit-unit pasar melakukan kesalahan, maka petugas tersebut harus diberukan sanksi dari instansi.

c. Belum Efektifnya Pemberlakuan Sanksi

Pengawasan terhadap pemungutan retribusi pasar umumnya dilakukan oleh petugas bagian pengawasan seringkali dilalaikan dan tidak dilakukan dengan sepenuhnya oleh petugas yang ditunjuk sebagai petugas pengawasan terhadap retribusi pasar.

Pemberlakuan sanksi kepada petugas pemungutan retribusi pasar yang dilakukan secara harian penyeteran terhadap penerimaan retribusi pasar seringkali adanya penundaan penyeteran yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas pasar yang telah ditunjuk oleh Perusahaan Daerah Pasar berhubung

untuk melakukan pemungutan retribusi pasar, dimana petugas pasar sering kali tidak mampu untuk menyetorkan uang sepenuhnya (adanya pemakaian pribadi).

Sanksi berupa peringatan atau tegoran itu bisa terjadi secara lisan maupun tertulis. Maksudnya secara lisan yang pertama diberi peringatan, yang kedua diberi skorsing, dan ketiga pemberhentian. Namun kenyataannya sanksi tersebut tidak berjalan dan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, dikarenakan adanya faktor ketidaktegaan, kekeluargaan atau hubungan darah didalam instansi.

d. Analisis Adanya Pungutan Liar

Analisis adanya pungutan liar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar petugas yang ditunjuk untuk pemungutan terdiri dari oknum-oknum kolektor dengan dilengkapi seragam dan tanda pengenal petugas pemungut retribusi pasar yang resmi dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palembang, tetapi masih ada pemungut atau petugas yang memakai seragam dan tidak terdaftar di Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.

2) Faktor External

Faktor External merupakan suatu keadaan yang menyatakan dan menggambarkan terjadinya selisih target penerimaan retribusi yang



ditetapkan oleh lingkungan luar perusahaan itu sendiri. Faktor

External secara umum yang ada di Perusahaan Daerah yaitu :

- a. Kesadaran wajib pajak/wajib retribusi daerah
- b. Pertumbuhan objek penerimaan
- c. Perekonomian daerah, Kebijakan Pemerintah
- d. Kondisi objek penerimaan.

2. Analisis Faktor Yang Paling Dominan Yang Mempengaruhi Tidak Tercapainya Target Retribusi Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya

Tabel IV.4
Daftar Hasil Jumlah Jawaban Atas Pertanyaan
Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya

No	Faktor yang menyebabkan Rendahnya Penerimaan Retribusi Pasar	Jumlah Jawaban Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kurang pegawai/petugas	2	1	3
2	Sistem Pengelolaan Penerimaan	3	0	3
3	Belum efektifnya Pemberlakuan Sanksi	5	3	8
4	Adanya Pungutan Liar	4	2	6
Jumlah		14	6	20

Berdasarkan dari jumlah jawaban wawancara langsung dengan karyawan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi dari faktor-faktor yang ada ialah pada Faktor Internal yaitu belum efektifnya pemberlakuan sanksi terhadap petugas yang menyimpang

↳ dari kewajiban yang mesti dilaksanakan. Akibatnya akan menimbulkan kurangnya setoran, bahkan penundaan penyeteroran dari waktu semestinya dan penurunan realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2008 sangat jauh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum dan sesudahnya. Realisasi pada tahun 2008 tersebut telah membuktikan bahwa lemahnya dan kurang tegas sanksi yang diterapkan pada petugas yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. Maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Bab Empat, maka dapat disimpulkan :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya ada 2 bagian, yaitu :

- 1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan suatu keadaan yang menyatakan dan menggambarkan terjadinya selisih target penerimaan retribusi yang ditetapkan oleh lingkungan dan dalam perusahaan itu sendiri, Faktor Internal secara umum yang ada di dalam Perusahaan Daerah Pasar yaitu Organisasi dan Perencanaan, Peraturan Daerah sisten prosedur, koordinasi dan kemampuan personil, analisis dan pengawasan, sarana dan prasarana yang dimiliki, sanksi bagi wajib pajak atau retribusi, dan data dasar. Dan faktor internal yang saat ini di alami Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yaitu :

- a. Kurangnya pegawai pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya pada bagian pengawasan
- b. Sistem pengelolaan penerimaan retribusi pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, pada pengendaliannya belum optimal.
- c. Belum Efektifnya pemberlakuan sanksi yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya terhadap petugas yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
- d. Adanya pungutan liar yang dilakukan oleh petugas yang tidak terdaftar identitasnya di Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.

2) Faktor External

Faktor External merupakan suatu keadaan yang menyatakan dan menggambarkan terjadinya selisih target penerimaan retribusi yang ditetapkan oleh lingkungan dan di luar perusahaan itu sendiri. Faktor External secara umum yang ada di Perusahaan Daerah yaitu Kesadaran wajib pajak/wajib retribusi daerah, Pertumbuhan objek penerimaan, Perekonomian daerah, Kebijakan Pemerintah, dan kondisi objek penerimaan.

2. Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi tidak tercapainya target retribusi pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya ialah pada Faktro Internal yaitu belum efektifnya pemberlakuan sanksi yang

seharusnya diterapkan oleh pihak Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya kepada oknum-oknum petugas yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang terdapat diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan Daerah Pasar Palembang jaya sebaiknya menambah jumlah pegawai yang ditugaskan pada bagian pengawasan dalam penerimaan/ pemungutan retribusi pasar, maka dengan ditambahkan pegaawai dapat membantu dalam upaya peningkatan target retribusi pasar yang telah ditetapkan.
2. Sebaiknya Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya mempunyai data perbandingan untuk menyimpulkan tingkat kewajaran pembayaran retribusi pasar yang dilakukan oleh pengguna jasa melalui unit pasar, maka dengan adanya data perbandingan akan meningkatkan retribusi kota Palembang, dan akan menunjukkan hasil yang baik dalam pengelolaan penerimaan retribusi pasar.
3. Bagi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, diharapkan agar lebih memperhatikan dan menangani dengan serius dalam menerapkan sanksi. Karena bila sanksi tersebut diterapkan dengan tegas maka tidak akan ada

- pengungutan liar, dan sebagainya. Sanksi tersebut harus diterapkan tanpa harus ada pandang buluh, baik itu keluarga maupun kerabat dekat. Sebab dengan pemberlakuan sanksi yang tegas akan menciptakan petugas yang disiplin dalam bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
4. Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya sebaiknya dengan masih adanya pengungutan liar lebih mengawasi petugas agar tetap memakai tanda pengenal untuk pemungutan retribusi pasar agar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tidak berbuat semena-mena terhadap penjual yang menggunakan jasa fasilitas pasar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Jamal Abdul Nasir. 2006. **Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang**. No 06 / Th xxxv Juni 2006. Hal (43-53).
- Erly Suandy. 2005. **Akuntansi Sektor Publik**, Buku Kedua Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Husein Bastian. 2003. **Metodelogi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**. PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Indra Bastian. 2003. **Akuntansi Sektor Publik**, Buku Kedua Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Marihot P. Siahaan. 2005. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Orba Kurniawan dan Hasyim. 2004. **Hukum Pajak**, Penerbit PBFU UMP, Palembang.
- Nan Lin alih Bahasa. W.Gulo. 2002. **Metode Penelitian Bisnis**, Penerbit Grasindo, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2004. **Metode Penelitian Bisnis**, Penerbit CV Alfabet, Bandung.
- Suparmoko. 2003. **Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**, Edisi Pertama. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Susilo. 2000. **Sebuah Konsep Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Dengan Pendapatan ZOOPP Lintas Ekonomi**, Penerbit FE Universitas Brawijaya.
- Soeratno dan Lincolin arsyad. 2003. **Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis**, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang **Retribusi Daerah**.
- Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2003 Tentang **Retribusi Pasar**.
- Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 1997 Tentang **Retribusi Pasar**.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, 2001, 2004 Tentang **Retribusi Daerah**.

Skripsi :

Nurmala Sari Tahun 2002 dengan judul “**Evaluasi Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Hubungannya Untuk Meningkatkan Retribusi Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya**”.



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA



Alamat : Jl .KHA.Dahlan No. 64 A Lt. II Pasar Bk.Kecil Fax 0711-352249 Telp 0711-320092 E-mail : ppj_pd@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 274 / PD. Pasar/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Syaifuddin Azhar, MM.
2. Jabatan : Direktur Utama PD Pasar Palembang Jaya,

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : Vallen Febriyanti
- b. NIM : 222007035
- c. Program Studi : S1 Ilmu Akuntansi Fakultas Ilmu Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang.

telah selesai melakukan Penelitian secara langsung, dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi, dengan judul " ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA ".

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, Juli 2011

DIREKSI PD. PASAR PALEMBANG JAYA
DIREKTUR UTAMA



Drs. H. SYAIFUDDIN AZHAR, MM



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Vallen Febriyanti

PEMBIMBING

NIM : 22 2007 035

KETUA : M. Taufiq Syamsuddin, S.E, Ak, M.Si

JURUSAN : AKUNTANSI

ANGGOTA :

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	24/7 2011	BAB I / a / m	/		Perbaikan
2	25/7 2011	BAB I / n / m	/		Perbaikan
3	26/7 2011	BAB I / n / m	/		revisi
4	27/7 2011	BAB II	/		Perbaikan
5	28/7 2011	BAB III	/		Perbaikan
6	29/7 2011	BAB III	/		Perbaikan
7	2/8 2011	BAB III	/		Perbaikan
8	3/8 2011	BAB III	/		revisi
9	4/8 2011	BAB III / DAFTAR ISI	/		revisi
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang

Pada tanggal : 04 / 08 / 2011

a.n. Dekan

Ketua Jurusan,

Drs. Sunardi, S.E, M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)
 JURUSAN AKUNTANSI (S1)
 MANAJEMEN PEMASARAN (D.II)

IZIN PENYELENGGARAAN

: No. 3450/D/T/2005
 : No. 3449/D/T/2005
 : No. 1611/D/T/2005

AKREDITASI

No. 018/BAN-PT/IAK-XI/S1/VI/2008 (B)
 No. 020/BAN-PT/IAK-IX/S1/IX/2005 (B)
 No. 005/BAN-PT/IAK-X/Dp-II/VI/2010 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

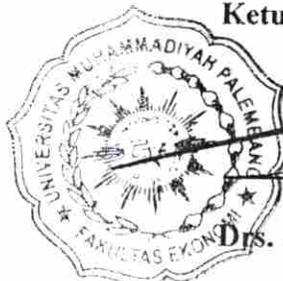
LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Senin, 22 Agustus 2011
Waktu : 09.00 WIB
Nama : Vallen Febriyanti
NIM : 22 2007 035
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA

TELAH DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
M. Taufiq Syamsuddin, S.E, Ak., M.Si	Pembimbing	23/8-11	
M. Taufiq Syamsuddin, S.E, Ak., M.Si	Ketua Penguji	23/8-11	
Muhammad Fahmi, S.E, M.Si	Anggota Penguji I	21/8 2011	
M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si	Anggota Penguji II	20/8 2011	

Palembang, September 2011
 An. Dekan
 Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Sunardi, S.E, M.Si



**ECONOMICS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER**

Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
Telp. 0711.511433
e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST	
FULL NAME	TIME TAKEN
VALLEN FEBRIYANTI	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D/M	DD/MM/YY
F	14-Feb-1989	29/7/2011

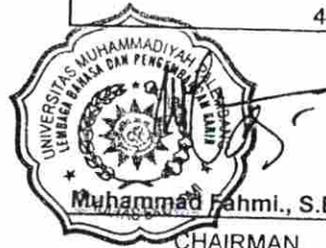
TOEFL PREDICTION SCORES			
SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
42	36	42	400

EXAMINEE'S NUMBER
489

DATE OF REPORT
4/8/2011

Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.

Consultant



Muhammad Fahmi, S.E., M.Si

CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under the name and address. This score is valid for only six months. This report is confidential.

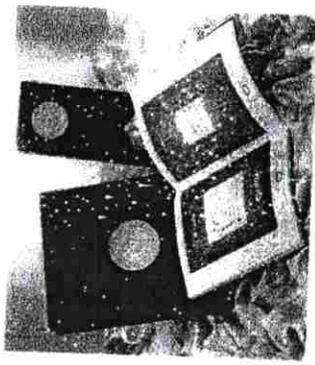




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

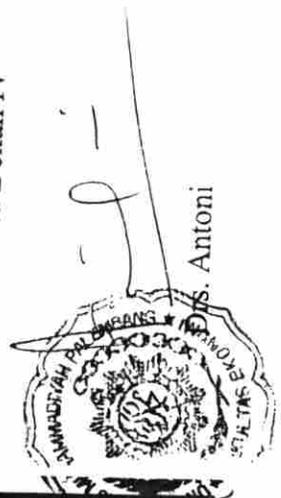
NAMA : VALLEN FEBRIYANTI
NIM : 222007035
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat CUKUP MEMUASKAN

Palembang, 20 September 2011

an. Dekan
Pembantu Dekan IV



Drs. Antoni



**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS DISAMAKAN / TERAKREDITASI**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

H i g a m

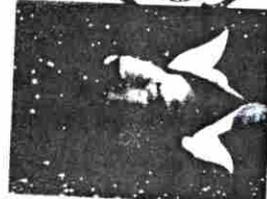
NO. 035 /H-4/UMP/III/2011

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang
Menerangkan bahwa :

Nama : VALLET FEBRIYANTI
Tempat/Tgl. Lahir : PALEMBANG, 14 FEBRUARI 1989
Nomor Pokok Mahasiswa : 22 2007 035
Fakultas/Jurusan : EKOWISATA - AGROTAHANSA

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Angkatan ke - 35 yang dilaksanakan dari tanggal 27 Januari sampai dengan 10 Maret 2011 bertempat di

Desa/Kelurahan : JINA BARU
Kecamatan : LUBAI
Kabupaten : MUARA BULUH
Dengan Nilai : A



Mengetahui



H. M. Idris, SE. M.Si
REKTOR

Palembang, 25 Maret 2011
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat



H. Hanannasir, M.Si

BIODATA PENULIS

Nama : Vallen Febriyanti
TTL : Palembang, 14 Februari 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl.Angkatan 66, Lr.Rajawali 2, No.1964 Palembang
Pekerjaan : Mahasiswi
Nama Orang Tua :
1. Ayah : Azhar Eddy,M.F
2. Ibu : Aminah
Pekerjaan Orang Tua :
1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang tua : SDA

Palembang, September 2011

Penulis

Vallen Febriyanti